



TAJUK	<p>Tugas Jogja Matangkan Solusi Sampah Berbayar</p>	
	<p>Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja menggelar uji coba penimbangan sampah di tiap depo. Kebijakan ini sebagai langkah awal penerapan rencana penarikan retribusi sampah. Uji coba dimulai 29 Oktober hingga 4 November 2024. Merasa butuh waktu untuk mendata jumlah sampah yang dibuang masyarakat, Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja memperpanjang masa uji coba dari Selasa (5/11) sampai Kamis (7/11). DLH menggunakan perpanjangan waktu ini untuk memastikan data pekan lalu yang masih diragukan soal jumlah sampah yang dibuang warga. Sejauh ini DLH sudah punya data rata-rata produksi sampah per orang selama masa uji coba sepekan ke belakang. Pada tahap uji coba masyarakat belum dibebani biaya retribusi namun sampah harus ditimbang terlebih dahulu sebelum dibuang ke depo. Dia juga meminta masyarakat untuk melapor jika diminta membayar retribusi. Setelah masa perpanjangan uji coba selesai, DLH akan membuat kajian mengenai besaran retribusi yang akan diterapkan. Nantinya ada rincian berat, jenis dan besaran retribusi sampah yang ditarik. Saat ini yang sudah ada baru jadwal pembuangan sampah yang sesuai dengan jenis sampah. Soal sampah, Jogja memang</p>	<p>perlu kerja keras dalam urusan pengelolannya ketika sudah tak bisa leluasa lagi membuangnya ke Tempat Pembuangan Akhir Piyungan. Persoalan tambah rumit ketika pembuangan sampah liar bermunculan di sejumlah titik. Penerapan sampah berbayar di depo akhirnya jadi satu di antara sejumlah solusi yang diambil Pemkot dengan tahapan yang sekarang diujicobakan. Tetapi, Pemkot tetap perlu memperhatikan dampak yang ditimbulkan dalam konsep itu. Jangan sampai ketika diterapkan, justru terjadi penumpukan sampah di jalanan ataupun menumpuk di sungai karena masyarakat keberatan dengan model sampah berbayar ini. Apalagi belum semua masyarakat punya kesadaran untuk memilah sampah dari rumah sebelum dibuang di tempat sampah. Hindari juga kemungkinan munculnya pungutan liar sampah yang bisa terjadi di kalangan warga. Ketika masa uji coba sampah berbayar selesai, DLH sebagai instansi teknisnya juga perlu membahas soal kekhawatiran daerah lain yang dijadikan lokasi pembuangan sampah liar kiriman dari Jogja, seperti yang terjadi di wilayah Sedayu, Bantul. Hal lain yang perlu diingat yakni penerapan sampah berbayar merupakan solusi jangka pendek.</p>
	<p>Bukan sebuah solusi jangka panjang bagi warga Jogja. Pemkot tetap perlu fokus ada solusi berkelanjutan, yakni meningkatkan infrastruktur pengolahan sampahnya, seperti pembangunan Tempat Pembuangan Sampah <i>Reduce Reuse Recycle</i> (TPS3R) serta mengatasi tumpukan sampah di mana-mana. Perkuat kerja sama antardaerah guna mengatasi masalah sampah, utamanya mencari lokasi pembuangan sampah. Libatkan provinsi ataupun Pemerintah Pusat agar koordinasi dengan daerah lain di wilayah DIY ataupun luar DIY bisa berjalan lancar, yang harapannya solusi yang didapat bakal maksimal.</p>	

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005